



AGRESIVITAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK DALAM SENGKETA WILAYAH DENGAN FILIPINA DI PULAU THITU

¹Ratu Salmazahra Karmilawaty, ²Canytea Janvy

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia

*Surel: sazahkaratu29@gmail.com

Tanggal pengiriman: 18 Januari 2023 | Tanggal revisi: 16 Agustus 2023 | Tanggal diterima: 14 Oktober 2024

ABSTRACT

This research aims to describe China's aggressive foreign policy in its territorial disputes with the Philippines in Thitu Island in Spratly Islands, South China Sea. The two countries both claim to own Thitu for its rich natural resources. The territorial claims of China and the Philippines over Thitu have escalated the territorial conflict in South China Sea and threatened the regional stability in Southeast Asia. This research seeks to discuss the implementation of China's aggressive foreign policy that the Philippines consider as a threat to its territorial claim over Thitu Island. As such, this research employs a qualitative method, with offensive realism theory in place. This research argues that the anarchic world system triggered China's aggressive foreign policy in a way that the country deploys its vessels to the island to deter the Philippines and claim Thitu. For China, obtaining Thitu's rich natural resources are national interests that the country intends to reach in South China Sea. China intends to control Thitu in a bid to strengthen its economic and military power. China's military actions around Thitu represent its foreign policy to claim the entire South China Sea.

Keywords: China, The Philippines, Thitu Island, South China Sea, Offensive Realism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri Tiongkok yang agresif terhadap Filipina dalam sengketa wilayah kedua negara di Pulau Thitu di Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan. Kedua negara tersebut sama-sama mengklaim kepemilikan atas Pulau Thitu karena sumber daya alamnya yang kaya. Klaim teritorial Tiongkok dan Filipina atas Pulau Thitu semakin meningkatkan eskalasi konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan dan mengancam stabilitas regional di Asia Tenggara. Penelitian ini berupaya untuk membahas penerapan kebijakan luar negeri agresif Tiongkok yang dipandang oleh Filipina sebagai ancaman terhadap klaim teritorialnya atas Pulau Thitu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teori realisme ofensif. Penelitian ini berpendapat bahwa sistem dunia yang anarkis mendorong perilaku agresif Tiongkok dalam bentuk pengiriman kapal-kapalnya ke Pulau Thitu untuk menggertak Filipina dan mengklaim Thitu. Bagi Tiongkok, memperoleh sumber daya alam yang kaya di Pulau Thitu merupakan kepentingan nasional yang Tiongkok ingin capai di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok berupaya untuk menguasai Thitu dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan militernya. Tindakan militer Tiongkok di sekitar Thitu merupakan bentuk kebijakan luar negerinya untuk mengklaim seluruh Laut Tiongkok Selatan.

Kata Kunci: Tiongkok, Filipina, Pulau Thitu, Laut Tiongkok Selatan, Realisme Ofensif

LATAR BELAKANG

Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di dunia yang sangat dimanfaatkan dalam bidang perdagangan. Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang sangat menguntungkan bagi negara-negara di sekitarnya, karena Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perdagangan yang sering dilalui oleh kapal-kapal pengangkut minyak. Laut Tiongkok Selatan dianggap strategis juga karena sepertiga perlintasan laut berlalu lalang di sana. Selain itu, di dalam Laut Tiongkok Selatan terdapat sumber daya alam yang melimpah. Hal ini yang menyebabkan wilayah Laut Tiongkok Selatan begitu diperebutkan hak miliknya oleh sejumlah negara di Asia, seperti Filipina, Tiongkok, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Malaysia. Selain itu, ada juga negara di luar kawasan Asia seperti Amerika Serikat yang mencoba untuk ikut ke dalam perseteruan yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan (Bangun, 2021).

Di balik perseteruan atas hak kepemilikan wilayah Laut Tiongkok Selatan, terdapat beberapa hukum internasional dan perjanjian internasional yang telah menentukan batas-batas wilayah tiap negara pada Laut Tiongkok Selatan. Pertama, argumen berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982, di mana setiap negara yang memiliki pesisir pantai berhak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Kedua, argumen atas hasil perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini negara diperkenankan untuk menggunakan perjanjian di masa lalu yang menyangkut wilayah yang diklaim. Ketiga, argumen atas praktik-praktik negara. Dalam hal ini negara dapat melakukan klaim dengan catatan negara telah melakukan penguasaan efektif pada wilayah yang diklaim. Contohnya seperti penguasaan yang dilakukan oleh Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan (Darusman, 2018).

Laut Tiongkok Selatan diklaim secara masing-masing negara sekitar dengan dasar-dasar yang berbeda karena adanya perbedaan regulasi hingga menimbulkan tumpang tindih wilayah antar negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Terdapat begitu banyak fitur objek yang diperebutkan. Namun, ini dapat dibagi menjadi lima grup objek utama yang diperebutkan, yaitu Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Scarborough Shoal, Pulau Paratas, dan Macclesfield Bank. Salah satu isu di Laut Tiongkok Selatan yang begitu terlihat adalah perebutan Kepulauan Spratly di antara Tiongkok dan Filipina (Muzwardi, 2006).

Sengketa terhadap Kepulauan Spratly adalah puncak dari persengketaan atau dinamika yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan karena wilayah ini diperebutkan oleh banyak negara. Kepulauan Spratly terdiri atas kumpulan pulau yang terdiri daripada 750 terumbu karang, islet, atol, pulau karang yang terletak di Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan ini terletak di kawasan perairan di Filipina dan Malaysia. Salah satu pulau dari kumpulan pulau yang ada di dalam Kepulauan Spratly adalah Pulau Thitu. Pulau Thitu yang memiliki luas sebesar 37,2 hektar merupakan pulau terbesar kedua yang ada di dalam Kepulauan Spratly. Pulau Thitu ini merupakan pulau terbesar yang dikelola oleh Filipina. Namun biarpun begitu, Pulau Thitu juga diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam (Muzwardi, 2006).

Filipina mengklaim kepemilikan Pulau Thitu secara *de facto* dan menamakannya dengan nama Pulau Pagasa. Hal ini berawal pada tahun 1955 di mana Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling kawasan Filipina. Filipina mengklaim beberapa pulau yang ada di Kepulauan Spratly berdasarkan beberapa pulau yang di kala itu dinyatakan sebagai *terra nullius* yang mana artinya pada saat itu Pulau Thitu adalah wilayah yang bukan milik negara tertentu. Dalam hukum internasional, *terra nullius* dimaksudkan sebagai wilayah dengan tanpa kepemilikan ataupun wilayah yang tidak pernah menjadi bagian dari negara yang berdaulat ataupun juga tidak ada satu pun negara berdaulat

yang dapat mengklaim atas wilayah tersebut. Namun, justru karena kala itu Kepulauan Spratly disebut *terra nullius*, Filipina mengklaim kepemilikan pulau tersebut karena dianggap sesuai dengan *de facto*, hal ini terjadi dengan hal yang dimaksud dengan *overlapping claim* atau saling mengklaim wilayah *terra nullius* oleh negara-negara di sekitar wilayah tersebut (Sulistiyani & Nugroho, 2016).

Selain itu, Filipina mulai mengklaim dan membangun aset sebagai langkah menegaskan kedaulatan di pulau-pulau yang berada dalam Kepulauan Spratly setelah Filipina diberikan kemerdekaan oleh Amerika Serikat dan juga mengajukan tuntutan atas kepemilikan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946. Di saat setelah kemerdekaan Filipina, Menteri Luar Negeri Filipina juga mengeluarkan pernyataan bahwa the *new southern island* (istilah dari Jepang pada pulau-pulau yang ada di Laut Tiongkok Selatan) telah diserahkan oleh Jepang kepada Filipina (Rowan, 2005).

Namun, klaim atas kepulauan Spratly dan pulau Thitu tidak hanya dilakukan oleh Filipina, tetapi juga oleh Tiongkok yang menganggap bahwa keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah milik negaranya dan ini diklaim atas dasar historis atau dikenal juga sebagai *nine-dash line*. *Nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus merupakan peta teritorial yang berisikan sembilan garis putus-putus yang menjadi batas pemisah imajiner yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengklaim sebagian besar dari wilayah Laut Tiongkok Selatan (Simanjuntak, 2020).

Menurut sejarah yang menjadi latar belakang *nine-dash line* ini, wilayah Laut Tiongkok Selatan ditemui oleh Dinasti Han pada abad Kedua Masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan memasukkan wilayah dari Laut Tiongkok Selatan ke dalam peta wilayah Tiongkok yang kemudian pemasukan wilayah ini diperkuat kembali pada masa Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Kemudian, peta wilayah *nine-dash line* ini dibuat kembali oleh Tiongkok pada tahun 1947. *Nine-dash line* yang

membentuk huruf U ini membentang ke seluruh Laut Tiongkok Selatan dan Tiongkok menganggap seluruh wilayah yang ada di dalam *nine-dash line* merupakan wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tiongkok, ini termasuk Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Natuna, dan lainnya. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, Tiongkok secara langsung menerbitkan peta klaimnya terkait *nine-dash line* ini dan berhasil memicu protes dari negara-negara di sekitar wilayah Laut Tiongkok Selatan (Simanjuntak, 2020).

Garis yang dibuat secara sepihak oleh Tiongkok ini tidak diakui atau diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982. Pada kenyataannya, Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, namun di sisi lain Tiongkok juga tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari negara-negara lain dan terus melanjutkan kebijakan luar negerinya di wilayah-wilayah yang diklaim atas dasar *nine-dash line*. Tiongkok bahkan menggunakan kekuatan militernya untuk selalu bersiaga dan berpatroli di perairan Laut Tiongkok Selatan untuk menghalangi adanya ancaman dari negara-negara lain yang juga menginginkan hak penuh atas kepemilikan Kepulauan Spratly ataupun Paracel (Santoso, 2021).

Atas klaim dan kegiatan Tiongkok di perairan Laut Tiongkok Selatan, pemerintahan Filipina berargumen bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok telah bertentangan dengan kedaulatan negara Filipina dan juga Hukum Laut Internasional. Pemerintahan Filipina juga merespons kebijakan luar negeri Tiongkok yang mana membuat pulau buatan di Kepulauan Spratly yang telah menyalahi kedaulatan negara Filipina dan menganggap bahwa Tiongkok tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut hingga akhirnya Filipina mengajukan Tiongkok ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada Januari 2013 agar Tiongkok menarik seluruh pasukannya juga menghentikan kebijakan Tiongkok yang mana membuat pulau buatan di Kepulauan Spratly (Amir et al., 2017).

Putusan persidangan Mahkamah Arbitrase Internasional keluar dengan Filipina sebagai pemenang atas klaim Laut Tiongkok Selatan dalam hal ini Kepulauan Spratly. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah atas Tiongkok menguasai wilayah ataupun sumber daya yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Mahkamah Arbitrase Internasional juga menyatakan bahwa Tiongkok telah mengganggu kedaulatan Filipina dan melakukan kerusakan sumber daya alam atas perbuatannya membuat pulau buatan di Kepulauan Spratly. Namun, Tiongkok merespons kembali keputusan bahwa Tiongkok tidak menerima, mengakui, dan tidak akan melaksanakan hasil putusan yang keluar (BBC News Indonesia, 2016). Tiongkok bahkan mengambil langkah yang lebih agresif dengan memboikot Mahkamah tersebut dengan alasan bahwa Mahkamah tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Tiongkok juga mengancam Filipina dengan konflik yang mungkin akan terjadi di kawasan sengketa. Dalam menghadapi setiap gerakan Tiongkok yang semakin agresif, Filipina dibantu oleh Amerika Serikat dalam segi pertahanan dan keamanan di mana kedua negara ini memiliki kerja sama bilateral terkait hal tersebut (Koesmawardhani, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Realisme ofensif merupakan salah satu dari turunan utama dari perspektif neorealisme. Teori realisme ofensif dikemukakan oleh seorang analis dari Amerika Serikat, John Mearsheimer (2001). Teori ini muncul berdasarkan pada argumen John Mearsheimer bahwa suatu negara tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kekuatannya, tetapi suatu negara juga akan berupaya untuk memaksimalkan kekuatannya agar negara-negara lainnya tidak bisa dan tidak akan berani untuk bertindak secara agresif (Riliani et al., 2020).

Realisme ofensif memandang sistem internasional sebagai sesuatu yang anarkis serta tidak terdapat otoritas yang kedaulatannya berada di atas negara,

kondisi ini terjadi karena struktur sistemlah yang menentukan bagaimana negara berperilaku. Hal ini yang dianggap membuat negara-negara untuk menerapkan kebijakan yang agresif, dengan itu juga mengakibatkan terjadinya konflik dalam struktur internasional. Ini karena juga karena realisme ofensif mengedepankan kemampuan negara untuk mempertahankan diri sebagai prioritas utama, dan untuk mempertahankan diri hanya bisa dicapai apabila suatu negara dapat memaksa negara lain agar tidak bisa mengancamnya (Asrudin, 2014).

John Mearsheimer juga berpendapat bahwa selain anarki, sistem internasional juga dipenuhi oleh ketidakpastian akan motif dari negara lain, sehingga cara terbaik untuk bertahan adalah dengan memiliki sebanyak-banyaknya dan juga terus meningkatkan kapabilitas militer. Karena kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor penentu atas keberlangsungan hidup suatu negara. John Mearsheimer juga mengungkapkan bahwa dalam sistem internasional, negara akan terus berupaya untuk mencapai hegemoni. Hegemoni sendiri merupakan kondisi di mana tidak ada satu pun negara yang dapat mengimbangi kekuatan militer dari suatu negara terkuat, sehingga negara tersebut dapat mendominasi negara lainnya (Art & Jervis, 2016).

Realisme ofensif jelas menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan dilema keamanan (*security dilemma*). Keadaan ini dianggap bahwa sistem yang anarki memaksa negara (terutama negara dengan kekuatan yang besar) untuk memaksimalkan kekuatan, karena untuk memastikan keamanan negara adalah dengan menjadi kekuatan terbesar dalam sistem (Dunne et al., 2013). Realisme ofensif membayangkan dunia politik internasional sebagai "*dog-eat-dog*" di mana kekuatan dan ketakutan itu mendominasi dalam interaksi. Karena dalam pandangan realisme ofensif, negara tidak akan melakukan penyeimbangan kekuatan apabila dihadapkan dengan kekuatan yang terlalu besar (Sulistiyan & Nugroho, 2016).

Terdapat sebanyak lima faktor menurut John Mearsheimer yang digunakan untuk mengukur perilaku ofensif dari suatu negara (Donnelly, 2000). *Pertama*, sistem internasional yang anarki. *Kedua*, kemampuan militer dari negara lain. *Ketiga*, kecurigaan dan ketakutan terhadap kapabilitas dari negara lain. *Keempat*, kelangsungan hidup suatu negara. *Kelima*, rasionalitas. Namun, bukan berarti ini menyatakan bahwa negara harus saling bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Setiap negara hanya disibukkan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan. Karena ketakutan terbesar suatu negara adalah ketika ada negara dengan kekuatan besar yang memiliki motif untuk menyerang mereka (Dunne et al., 2013).

METODOLOGI

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Untuk memahami fenomena atau isu, penulis mengumpulkan data-data yang kemudian akan dianalisis. Hasil analisis ini dapat berupa penggambaran ataupun deskripsi. Dalam langkah penelitian ini, *pertama*, penulis memulai dengan mengidentifikasi suatu fenomena atau isu yang menjadi sasaran dalam penelitian. *Kedua*, penulis masuk ke dalam tahap pembahasan atau penelusuran kepustakaan, dalam hal ini penulis mencari bahan bacaan berupa artikel jurnal, buku, ataupun berita yang memuat fenomena ataupun isu yang diangkat. *Ketiga*, penulis masuk dalam tahap pengumpulan data. *Terakhir*, penulis akan melakukan analisis dan penafsiran data (Fadli, 2021). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data-data yang tidaklah secara langsung dimiliki oleh penulis. Data sekunder umumnya berupa catatan, bukti, ataupun laporan yang telah tersusun dan dipublikasikan. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan buku, jurnal, dan laporan berita yang berkaitan dengan fenomena dan isu yang diteliti.

DISKUSI

Nilai Strategis Pulau Thitu di Laut Tiongkok Selatan

Pulau Thitu di perairan Laut Tiongkok Selatan menyimpan sumber daya perikanan yang menggiurkan, cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko dan merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Pulau Thitu dan pulau-pulau di sekitarnya ini salah satu tempat yang paling penting secara strategis. Ikan yang melimpah dan juga 900 triliun kaki kubik gas alam langka. Cadangan gas yang dimiliki Pulau Thitu mencapai 266 triliun kaki dan menyumbang 60-70% hidrokarbon, yang mana dapat sangat dimanfaatkan (Citradi, 2020).

Tak hanya estimasi cadangan gas, tetapi juga berlaku untuk cadangan minyaknya. Ada yang memperkirakan cadangan minyak mencapai 7,7 miliar barel. Sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlahnya mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi. Beralih ke komoditas pangannya, juga menyimpan kekayaan ikan yang tak ternilai harganya. Pada 2012, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan bahwa Laut Tiongkok selatan memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Beberapa komoditas perikanan laut yang terkandung di dalam Laut Tiongkok Selatan seperti ikan layur, makerel, teri, udang, kepiting hingga ikan kecil lainnya. Jika melihat kekayaan alam yang melimpah ini dan diikuti dengan Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional, wajar saja jika Laut Tiongkok Selatan sering menjadi rebutan (Citradi, 2020).

Selain kaya akan sumber daya alamnya, Pulau Thitu juga berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. Sebesar 50% dari total kapal tanker pengangkut minyak global melewati Laut Tiongkok Selatan. Jumlah kapal tanker pengangkut minyak yang melalui Laut Tiongkok Selatan tiga

kali lebih banyak dari Terusan Suez dan lebih dari lima kali Terusan Panama. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia juga berlokasi di Laut Tiongkok Selatan (Gde et al., 2022).

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini karena pertumbuhan dan fluktuasi ekonominya mempengaruhi perekonomian dunia. Selain itu, juga karena laut ini merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia. Penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya. Dengan demikian, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusifnya pun akan semakin luas, terutama untuk negara-negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982. Penguasaan wilayah ini akan memberikan keuntungan geostrategis bagi negara karena, *pertama*, wilayah ini menjadi akses yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik di sebelah timur. *Kedua*, wilayah ini merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai *maritime superhighway* karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hampir sepertiga kapal di dunia melintasi kawasan ini. Jumlah kapal tanker yang melewati Laut Tiongkok Selatan tiga kali lebih banyak dibanding Terusan Suez, dan lima kali lipat dibanding Terusan Panama (Nasir & Dahalan, 2017).

Diperkirakan 50% perdagangan dunia melintas perairan ini. Selain itu, pasokan impor minyak bumi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika juga sebagian besar melewati perairan ini. Selain minyak bumi, jalur ini juga banyak dilalui kapal yang mengangkut gas alam cair (LNG), batu bara, dan bijih besi. Berbagai komoditas tersebut sangat vital sebagai penggerak industri negara-negara Asia Timur. Laut Tiongkok Selatan juga memiliki wilayah yang sangat strategis untuk jalur

perdagangan atau *Sea Line of Trade* (SLOT) dan jalur komunikasi Internasional atau *Sea Line of Communication* (SLOC) (Nasir & Dahalan, 2017).

Kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Diperkirakan cadangan minyak dan gas tersebut merupakan yang terbesar keempat di dunia. Untuk keseluruhan Laut Tiongkok Selatan, salah satu kalkulasi menyebutkan bahwa cadangan minyaknya mencapai 213 miliar barel, sementara untuk Kepulauan Paracel dan Spratly sekitar 105 miliar barel. Selain minyak bumi, kawasan ini juga diperkirakan mengandung sumber daya hidrokarbon yang melimpah. *United States Geological Survey* menaksir bahwa 60-70% hidrokarbon tersebut berupa gas alam. Laut Tiongkok Selatan juga merupakan daerah yang sangat penting bagi ekosistem, badan air ini memiliki sepertiga keragaman hayati laut dunia (Widodo, 2019).

Ekonomi di Laut Tiongkok Selatan sangat fantastis. Nilai perdagangan internasional yang melalui kawasan ini mencapai US\$ 5,3 triliun per tahun, dengan US\$ 1,2 triliun di antaranya dengan AS. Meski demikian *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) memperkirakan nilainya jauh lebih rendah, bervariasi antara US\$ 2,1-3,7 triliun. Adapun data terakhir pada 2016 menunjukkan nilainya sebesar US\$ 3,4 triliun. Laut Tiongkok Selatan juga kaya dengan sumber daya. Seperti minyak dan gas alam (migas) dan 10% dari total sumber daya perikanan dunia. Menurut estimasi *Energy Information Administration* (EIA), cadangan migas di sana setidaknya 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kubik kaki gas alam (Arbar, 2020).

Agresivitas Kebijakan Luar Negeri Tiongkok atas Filipina di Pulau Thitu

Terdapat banyak kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok di sekitar Pulau Thitu yang menyebabkan Filipina merasa terganggu kedaulatannya

hingga memutuskan untuk melaporkan Tiongkok kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Gangguan ini berupa aktivitas yang dilakukan Tiongkok di beberapa pulau yang ada di sekitar Pulau Thitu di Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini Tiongkok melakukan militerisasi atas wilayah-wilayah dengan landasan pacu, pelabuhan, dan sistem radar (Gunawan, 2023).

Pertama, berdasarkan laporan dari lembaga *think tank* Amerika Serikat pada Desember 2017, bahwa sepanjang 2017, Tiongkok begitu bersemangat dalam membangun peralatan yang mendukung pengawasan dan laut. *Kedua*, pada tanggal 3 Desember 2018, Tiongkok mengirimkan setidaknya 24 kapal ke Pulau Thitu yang mana Filipina tengah melakukan konstruksi di wilayah yang disengketakan tersebut. Selain itu, terdapat laporan bahwa sekiranya Tiongkok telah mengerahkan armada sebanyak hampir 100 kapal ke Pulau Thitu. Hal ini diyakini sebagai upaya Tiongkok guna menghentikan konstruksi yang tengah berlangsung yang sedang dilakukan oleh pemerintah Filipina (Utomo, 2018).

Kemudian, *ketiga*, pada 20 Desember 2018, citra satelit menunjukkan adanya 95 kapal Tiongkok di dekat Pulau Thitu hingga berkurang menjadi 42 kapal pada 26 Januari 2019. Kemudian, dua kapal terlihat pada 20 Desember yang diidentifikasi oleh *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI) bahwa itu adalah kapal perang frigat PLAN Type 053H1G dan CCG Type 818 Cutter. Kemudian, Philstar juga menunjukkan bahwa kapal penjaga pantai, Tiongkok dan juga kapal penangkap ikan terlihat berada di dekat Sandy Cay, sebuah gugus pulau yang berjarak sekitar 4,63 kilometer laut terhitung dari Pulau Thitu. Selama sisa bulan hingga memasuki tahun 2019, jumlah armada Tiongkok yang terdiri dari kapal-kapal dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai Tiongkok, dan berbagai kapal penangkap ikan, berfluktuasi ketika mereka menempatkan diri di dekat Pulau Thitu diperebutkan ketika konstruksi dimulai. Kapal-kapal penangkap ikan berada sekitar 3,7 dan 10,1 kilometer laut di sebelah barat Pulau Thitu, sedangkan kapal-kapal

angkatan laut dan penjaga pantai beroperasi sedikit lebih jauh ke selatan dan barat Pulau Thitu (Saputra, 2019).

Keempat, menurut AMTI di tahun 2019, Tiongkok baru-baru ini mulai mengirim kapal Subi Reef yang mana terletak sekitar 22,2 kilometer laut dari Pulau Thitu. Kemudian, Tiongkok juga mengerahkan sekiranya 200 kapal nelayan Tiongkok yang diduga diawasi milisi di sekitar wilayah Pulau Thitu di Laut Tiongkok Selatan. Filipina telah memprotes keras dengan cara diplomatik atas kehadiran kapal-kapal nelayan ini, namun Tiongkok tidak mengindahkan hal tersebut. Pada bulan November 2022, kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan pemblokiran kepada kapal pasokan Filipina yang tengah mengirimkan pasokan ke pasukan Filipina di perairan dari wilayah yang disengketakan (Saputra, 2019).

Namun, Tiongkok tidak hanya melakukan pemblokiran tetapi juga merebut puing roket yang tengah dibawa oleh kapal pasokan Filipina tersebut. Kronologinya, militer Filipina melihat adanya puing-puing yang hanyut dalam gelombang kuat berada dekat gundukan pasir yang jaraknya lebih dari 500 meter dengan menggunakan kamera jarak jauh di Pulau Thitu. Kemudian, militer Filipina mengambil benda terapung itu dan membawanya ke pulau mereka dengan menggunakan tali yang diikatkan ke perahu. Akan tetapi, kapal Tiongkok dengan nomor haluan 5203 memblokir jalan dari militer Filipina dan mengerahkan perahu karet dengan personel yang mengambil benda terapung secara paksa dengan memotong tali penarik yang melekat pada kapal Filipina. Merespons hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah dan mengatakan bahwa tidak ada hal yang disebut intersepsi dan penyitaan di tempat kejadian (Rafie, 2022).

Kemudian, *kelima*, pada bulan Desember 2022, Filipina melaporkan adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok di empat pulau yang ada di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Filipina kembali menganggap hal ini mengancam terutama untuk kedaulatan di Pulau Thitu (VOA Indonesia, 2022).

Selain itu, Tiongkok juga telah membangun pangkalan militer di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Spratly, lebih tepatnya Tiongkok telah memiliki tiga pangkalan militer berskala besar, yaitu berada di Pulau Karang Subi, Pulau Mischief, dan Pulau Fiery Cross. Selain itu, Tiongkok juga memiliki pangkalan militer di Pulau Woody dan Kepulauan Paracel yang mana kedua wilayah tersebut berada di utara dari Kepulauan Spratly (Hanifah, 2020).

Salah satu pangkalan militer Tiongkok dibangun di Kepulauan Spratly, 250 kilometer Filipina. Dalam sebuah laporan perusahaan perangkat lunak geospasial, Similarity, menunjukkan ada infrastruktur seperti radar, antena, dan segala sesuatu yang berpotensi menjadi pangkalan militer di Mischief Reef. Mischief Reef adalah terumbu karang berbentuk cincin yang diakui Pengadilan Arbitrase Den Haag sebagai milik Filipina, namun diduduki Tiongkok sejak 1995. Ada konstruksi di tujuh area antara Mei 2020 dan Februari 2021. Tertanggal 7 Mei 2020 dengan jelas menunjukkan sebidang ruang kosong, yang sekarang ditempati oleh struktur silinder selebar 16 meter (Arbar, 2021).

Pulau itu juga menunjukkan struktur beton dengan kubah bulat, seperti penutup tahan cuaca yang digunakan untuk melindungi antena radar di dekatnya. Similarity menyatakan ini mungkin merupakan struktur radar tetap. Sementara itu Dr. Jay Batungbacal, Direktur *Institute for Maritime Affairs Law of the Sea* di Universitas Filipina, mengatakan infrastruktur baru itu mungkin menunjukkan bahwa Tiongkok sedang melakukan penggalian. Tiongkok, kata dia menambah banyak peralatan radar di sana (Arbar, 2021).

Tiongkok pada dasarnya menambahkan peralatan lensa survei, tampaknya radar Penambahan radar baru tampaknya menunjukkan bahwa Tiongkok benar-benar memperluas kemampuan pulau buatan ini. Fakta itu terus berlanjut meskipun semua yang telah terjadi di seluruh dunia, itu benar-benar menunjukkan niat

Tiongkok untuk benar-benar mengembangkan sepenuhnya pulau-pulau buatan ini menjadi pangkalan militer besar-besaran (Arbar, 2021).

Sebelumnya, dalam laporan baru US Naval War College, Tiongkok juga disebut membangun kota seluas 800 ribu mil persegi di Shansa, Kepulauan Paracel. Itu setara 1.700 kali New York, Amerika Serikat. Beijing berusaha memperluas jangkauan angkatan lautnya yang sedang tumbuh untuk melindungi kepentingan maritimnya dan meningkatkan daya tawar dalam pembicaraan dengan negara-negara lain. Kapal angkatan laut Tiongkok telah terlihat di berbagai kawasan, mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, di timur Taiwan dan Jepang (Arbar, 2021).

Tiongkok berhasil melakukan pembangunan yang pesat di beberapa pulau di Laut Tiongkok Selatan, di antaranya di Kepulauan Paracel (Pulau Woody/Yongxing, Tree/Zaoshu, dan Drummond/Jinqing), Fiery Cross, Mischief Reefs, dan Subi Reefs yang akan dibangun kota-kota pulau. Pulau Woody menjadi patokan (*blue print*) bagi Pemerintah Tiongkok untuk membangun fasilitas-fasilitas di pulau-pulau lainnya. Tiongkok menyiagakan Rudal balistik Dong Feng (DF)-26 di perairan Laut Tiongkok Selatan sebagai upaya untuk menangkal ancaman AS (Hutama, 2019).

Tiongkok sedang berupaya memblokir upaya Filipina memperbaiki fasilitas strategis di Pulau Thitu yang sedang diperebutkan oleh kedua negara, yang berpotensi terjadi bentrokan baru di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini terjadi setelah Tiongkok sepakat mengeluarkan bantuan investasi miliaran dolar kepada Filipina. Pemerintah Tiongkok berencana membangun 20 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung di Laut Tiongkok Selatan, khususnya di Kepulauan Paracel dan Spratly dengan dana sebesar US\$14 milyar yang akan berfungsi penuh pada tahun 2021. Selain dimanfaatkan untuk sumber energi dan penerangan, PLTN tersebut juga berfungsi untuk mempercepat eksploitasi minyak, gas alam, dan mineral mudah terbakar yang ditemukan di dasar laut (Hutama, 2019).

Secara umum, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat telah meningkatkan kekuatan dan aktivitas militernya di kawasan dan keduanya telah melakukan latihan militer skala besar, sehingga menandakan kompetisi dan rivalitas yang kuat di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan. Peningkatan rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat telah mengakibatkan situasi di Laut Tiongkok Selatan lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi (Hutama, 2019).

Kepentingan Nasional Tiongkok di Pulau Thitu

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan pokok dan juga faktor penentu utama yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Klaim kepemilikan atas kawasan Laut Tiongkok Selatan, salah satunya pada Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh Tiongkok, didasarkan pada tiga hal pokok yang menjadi kepentingan nasional bagi Tiongkok, yaitu kebutuhan akan keamanan dan pertahanan, kemajuan ekonomi, dan politik.

Dari aspek keamanan dan pertahanan, ini karena Tiongkok di masa lalu kurang memperhatikan akan potensi laut. Ini menyebabkan lemahnya kekuatan laut di sekeliling Tiongkok yang nantinya dapat dijadikan kesempatan sebagai penetrasi imperialisme Barat, yang dapat mengakibatkan terbaginya wilayah Tiongkok ke dalam penguasaan kekuatan asing. Kemudian, wilayah Kepulauan Spratly yang berada di Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang begitu strategis dan untuk hal itu Tiongkok membutuhkannya untuk membentuk armada angkatan laut yang kuat dan pangkalan militernya yang strategis. Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang berambisi untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal di tingkat internasional, memiliki lokasi yang strategis tentu akan memperkuat armada militernya (Harini, 2011).

Dari aspek ekonomi, Tiongkok meyakini bahwa cadangan minyak yang ada di Laut Tiongkok Selatan dapat menopang kebutuhan dalam negerinya meskipun jumlahnya pun belum pasti. Ditambah pula, terjadi krisis minyak dunia yang berhasil mempengaruhi perekonomian dalam negeri akan pentingnya memiliki cadangan minyak. Alasan lainnya juga karena Tiongkok yang sedang dalam proses modernisasi, menjadi begitu cepat pertumbuhan penduduknya dan industrialisasi yang terjadi, hal ini mengakibatkan semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap sumber energi mineral. Karena hal itu, memiliki ladang cadangan minyak akan begitu menguntungkan bagi Tiongkok (Harini, 2011).

Dari aspek politik, klaim ini dapat dikatakan berkaitan dengan strategi politik dari Tiongkok kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Klaim ini dilakukan sebagai penegasan bahwa Tiongkok memiliki peran sebagai negara besar di Asia. Ini juga bisa dijadikan sebagai langkah Tiongkok untuk menahan pengaruh Amerika Serikat yang berada di balik Filipina. Dengan begitu Tiongkok akan bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara puncak di kawasan Asia (Harini, 2011).

Kapabilitas militer merupakan salah satu hal yang dapat membuat suatu negara percaya diri untuk ikut serta dalam konflik wilayah yang disengketakan. Pada wilayah Pulau Thitu, Filipina yang memiliki kapabilitas militer jauh di bawah Tiongkok. Dalam sepuluh tahun terakhir, Tiongkok telah menduduki kapabilitas anggota militer, menciptakan angkatan laut hingga mencapai senjata militer yaitu nuklir dan balistik terbesar di dunia. Saat ini Tiongkok memiliki 2.000.000 tentara aktif, yang menurut Statista, adalah negara dengan jumlah tentara aktif terbanyak. Kemudian, Tiongkok memiliki 777 unit kapal perang dan kapal selam. Lalu, Tiongkok memiliki 350 hulu ledak nuklir dengan rudal balistik jarak menengah dan jauh. Tiongkok juga mengakselerasi modernisasi militernya. Ini mencakup sejumlah area, termasuk konsolidasi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, strategi, teknologi,

dan sumber daya manusia. Kini, Tiongkok berada di posisi ketiga dalam peringkat militer dunia (Anwar, 2022; Ridwan, 2023). Berbanding jauh dengan Tiongkok, Filipina mempunyai sekitar 280.000 tentara aktif. Kemudian memiliki 182 armada tempur berupa helikopter dan pesawat tempur. Lalu memiliki 93 aset tempur yang dapat digunakan dalam peperangan bagi armada laut. Filipina berada di posisi ke-32 dalam peringkat militer dunia (Ridwan, 2023; C. Utama, 2022).

Tiongkok saat ini tengah berusaha dalam meningkatkan kekuatan militer sebesar-besarnya untuk memenuhi segala macam kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingannya adalah untuk mendominasi ekonomi terutama di kawasan Asia-Pasifik. Tiongkok juga berusaha meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya demi memenuhi ambisinya untuk menjadi negara *superpower* dan untuk membendung kekuatan Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Banyak bidang yang ditingkatkan oleh Tiongkok, baik itu dalam segi ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan lainnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mempertahankan wilayah merupakan salah satu bentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, seharusnya negara tidak diperbolehkan untuk melakukan segala aktivitas di wilayah sengketa. Namun, negara-negara terus berusaha untuk mengklaim wilayah sengketa demi tercapainya kepentingan nasional mereka. Salah satunya seperti Tiongkok yang terus berusaha mengklaim Pulau Thitu yang mana dapat memenuhi kepentingan nasionalnya baik dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, atau pun dalam bidang politis.

Menurut pandangan realisme ofensif, Tiongkok terus berusaha untuk mengklaim karena di Pulau Thitu terdapat banyak sumber daya alam yang berharga yang dapat meningkatkan ekonominya sehingga Tiongkok juga akan dapat

meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Pulau Thitu juga merupakan pulau kedua yang ada di Kepulauan Spratly yang kini menjadi pusat logistik militer Filipina yang dibantu oleh Amerika Serikat. Tiongkok yang ingin mendominasi Asia-Pasifik tentu harus melakukan gerakan untuk menahan Filipina yang dibantu Amerika Serikat dengan maksud membendung kekuatan Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Jika Tiongkok berhasil mengganggu kedaulatan Filipina di Pulau Thitu, selain dapat membendung Amerika Serikat, Tiongkok juga dapat mengklaim Pulau Thitu, di mana sebagai wilayah sengketa, hal ini akan membuat kepentingan nasionalnya tercapai.

BIBLIOGRAFI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Amir, F., Yuniati, S., Abubakar, D., & Hara, E. (2017). Penolakan Tiongkok Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut Tiongkok Selatan. *E-SOSPOL*, 2.
- Anwar, L. A. (2022, October 6). *Kekuatan Militer Tiongkok Berkembang Drastis dalam Satu Dekade*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/10/05/kekuatan-militer-tiongkok-berkembang-drastis-dalam-satu-dekade>
- Arbar, T. F. (2021, February 22). *Tertangkap Satelit, Tiongkok Buat Pangkalan Militer Besar di LCS*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210222073441-4-225035/tertangkap-satelit-tiongkok-buat-pangkalan-militer-besar-di-lcs?page=all>
- Arbar, T.F. (2020, July 25). *Klaim Tiongkok & Harta Karun Migas di Laut Tiongkok Selatan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200724145935-4-175189/klaim-tiongkok-harta-karun-migas-di-laut-tiongkok-selatan>
- Art, R. J., & Jervis, R. (2016). *International Politics : Enduring Concepts and Contemporary Issues*. Rowman & Littlefield.
- Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Indonesian Journal of International Studies*, 1(2).
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1).

-
- Citradi, T. (2020, July 3). *Ada Harta Karun Apa yang Diperebutkan di Laut Tiongkok Selatan?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200703144957-4-170032/ada-harta-karun-apa-yang-diperebutkan-di-laut-Tionggkok-selatan>
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Cita Hukum*, 6(2).
- Donnelly, Jack. (2000). *Realism and International Relations*. Cambridge University Press.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations Theories*. Oxford University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Gde, L., Laksmi, C. S., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5.
- Gunawan, S. M. (2023, January 3). *Tionggkok Gencar Reklamasi Pulau-Pulau Tak Berpenghuni di Laut Tionggkok Selatan*. RMOL.ID. <https://rmol.id/dunia/read/2023/01/03/559113/china-gencar-reklamasi-pulau-pulau-tak-berpenghuni-di-laut-china-selatan>
- Hanifah, S. (2020, August 10). *Cek Fakta: Tidak Benar Tionggkok Membangun Pangkalan Militer di Laut Natuna*. Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-Tionggkok-membangun-pangkalan-militer-di-laut-natuna.html>
- Harini, S. (2011). Kepentingan Nasional Tionggkok Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(21).
- Hutama, M. D. P. (2019). Intervensi Negara Ketiga Dan Peran Indonesia Bersama Asean Pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS). *Dinamika Global: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2).
- Koesmawardhani, N. W. (2016, July 12). *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut Tionggkok Selatan*. Detik. <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>
- Muzwardi, A. (2006). Konflik Negara-Negara Asean Dan Tionggkok Terhadap Kepulauan Spratly. *Prosiding Seminar Nasional Perbatasan & Kemaritiman*, 1.
- Nasir, M., & Dahalan, W. S. A. W. (2017). Penyelesaian Pertikaian Kepulauan Spratly: Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan Bersama di Bawah UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 6(1).

-
- Rafie, B. T. (2022, November 22). *Memanas! Ini Kronologi Filipina dan Tiongkok Berebut Puing Roket di Laut Tiongkok Selatan*. Kontan.Co.Id. <https://internasional.kontan.co.id/news/memanas-ini-kronologi-filipina-dan-tiongkok-berebut-puing-roket-di-laut-tiongkok-selatan?page=all>
- Ridwan, E. (2023, January 7). *100 Ranking Militer Dunia 2023, Indonesia Urutan Berapa?* Detik Sulsel. <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sulsel/berita/d-6503707/100-ranking-militer-dunia-2023-indonesia-urutan-berapa/amp>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Riliani, N. P. G., Sushanti, S., & Priadarsini, N. W. R. (2020). Analisis Pengembangan Anti-Satelit Tiongkok Menurut Neo-Realisme Defensif. *Jurnal Harian Regional*, 1(2).
- Rowan, J. P. (2005). The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South Tiongkok Sea Dispute. *Asian Survey*, 45(3)
- Santoso, S. P. (2021). *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut Tiongkok Selatan*. Deepublish.
- Saputra, E. Y. (2019, February 10). *Intimidasi Filipina, Tiongkok Kirim 95 Kapal ke Laut Tiongkok Selatan*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1173976/intimidasi-filipina-cina-kirim-95-kapal-ke-laut-cina-selatan>
- Simanjuntak, M. (2020). Menolak Klaim Historis Tiongkok “Nine Dash Line” dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan serta Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sulistiyani, E., & Nugroho, A. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut Tiongkok Selatan Antara Tiongkok Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam. *Novum : Jurnal Hukum*, 3(4).
- Utama, C. (2022, July 19). *Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia vs Filipina, Siapa yang Paling Siap untuk Perang?* Rumah123. <https://artikel.rumah123.com/perbandingan-kekuatan-militer-indonesia-vs-filipina-siapa-yang-paling-siap-untuk-perang-133798>
- Utama, L., & Adrianjara, D. (2016, July 26). *Filipina Tolak Intervensi AS soal Laut Tiongkok Selatan*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/801355-filipina-tolak-intervensi-as-soal-laut-tiongkok-selatan?page=all>
- Utomo, A. P. (2018, January 9). *Tiongkok Beraktivitas di Wilayah Sengketa, Filipina Beri Nota Diplomatik*. Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/19043131/Tiongkok-beraktivitas-di-wilayah-sengketa-filipina-beri-nota-diplomatik?page=all>
- VOA Indonesia. (2022, December 22). *Filipina Prihatin atas Tindakan Tiongkok Mereklamasi Daratan di Laut yang Disengketakan*. VOA Indonesia.

<https://www.voaindonesia.com/a/filipina-prihatin-atas-tindakan-Tiongkok-mereklamasi-daratan-di-laut-yang-disengketakan/6885459.html>

Widodo, L.D. (2019). *Strategi Indonesia Pada Masa Presiden Joko Widodo dalam Menghadapi Ancaman Konflik Laut Tiongkok Selatan*.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30062>